

PELAPORAN IKK 2021 KOTA JAMBI

Tanggal Cetak 26-03-2022 19:34

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian	PEMDA Keterangan	File Bukti	Diperbarui	Status	APIP Keterangan	Diperbarui
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Terakreditasi	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau	43.570503		Ada	2022-03-24	OK	-	2022-03-24
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 53034. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 56675	93.575651		Ada	2022-03-24 07:37:59	OK	-	2022-03-24 10:11:18
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 20769. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 29097	71.378493		Ada	2022-03-24 10:14:39	OK	-	2022-03-24 10:19:28

1.a.4	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pengkangan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 1141. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 19585	5.8258872	Ada	2022-03-24 10:19:13	OK	-	2022-03-24 10:20:29
1.b.1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 1622. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 621365	0.2610382	Ada	2022-03-07 13:19:05	OK	Jumlah Penduduk 621.365 merupakan data GIS Kota Jambi Per 31 Desember 2021	2022-03-24 10:24:57
1.b.2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 10. Jumlah RS di kabupaten/kota = 17	58.823529	Ada	2022-03-24 10:28:03	OK	-	2022-03-24 10:29:35
1.b.3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 12991. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 12991	100	Ada	2022-03-07 13:27:14	OK	-	2022-03-24 10:30:52
1.b.4	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 12400. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 12400	100	Ada	2022-03-07 13:30:12	OK	-	2022-03-24 10:31:19
1.b.5	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 12400. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 12400	100	Ada	2022-03-07 13:31:41	OK	-	2022-03-24 10:44:35
1.b.6	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 59048. Jumlah balita di kabupaten/kota = 59048	100	Ada	2022-03-07 13:33:13	OK	-	2022-03-24 10:32:04
1.b.7	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 6258. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 68725	9.1058567	Ada	2022-03-24 10:43:45	OK	-	2022-03-24 10:44:51
1.b.8	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 75000. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 75000	100	Ada	2022-03-07 13:38:45	OK	-	2022-03-24 10:33:09
1.b.9	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 41419. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 41419	100	Ada	2022-03-07 13:41:37	OK	-	2022-03-24 10:33:58
1.b.10	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 32210. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 35000	92.028571	Ada	2022-03-24 10:38:23	OK	-	2022-03-24 10:40:34

[illegible]

[illegible]

1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal 3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan 5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	625	Ada	2022-03-08 12:41:04	OK	-	2022-03-24 11:46:01
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Ada	2022-03-08 12:43:16	OK	-	2022-03-24 11:46:41
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota 2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan 4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa 5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang	&nbsp; Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran &nbsp; &nbsp;	100	Ada	2022-03-08 12:45:40	OK	-	2022-03-24 11:47:08
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	14.4 Total waktu respon time : 720/50 = 14.4	Ada	2022-03-24 11:50:07	OK	-	2022-03-24 11:50:59

2.i.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal. &	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi = 0. Luas izin lokasi yang diterbitkan = 0	0	Ada	2022-03-09 11:35:33	OK		2022-03-24 16:22:45
2.i.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee &	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha; = 0. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 0	0	Ada	2022-03-09 11:36:27	OK		2022-03-24 16:23:13
2.i.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 0. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 0	0	Ada	2022-03-09 11:37:01	OK		2022-03-24 16:23:49
2.i.6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi &	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 1. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 2	50	Ada	2022-03-09 11:37:25	OK	-	2022-03-24 16:24:25
2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan kab/kota terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		58	Ada	2022-03-25 07:57:22	OK	-	2022-03-25 08:01:08
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 11900294. Jumlah seluruhTotal vol timbunan sampah tahun berjalankabupaten/kota = 15810698	75.267354	Ada	2022-03-25 07:59:25	OK	-	2022-03-25 08:01:21

2.m.1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	- Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan - Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun - Aneka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) - Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KBKBP (advokasi dan KIA) - Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KBKBP	TFR (Angka Kelahiran Total)		2.01		Ada	2022-03-09 08:22:57	OK	-		2022-03-24 16:26:45
2.m.2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	- Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP - Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontracepsi Jangka Panjang (MKJP) - Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KBKBP yang efektif - Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 44819. Jumlah Pasangan Usia Subur = 81190	55.202611		Ada	2022-02-24 09:38:01	OK	-		2022-03-24 16:26:59
2.m.3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	- Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah - Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 13692. Jumlah Pasangan Usia Subur = 81190	16.864146		Ada	2022-02-24 09:39:21	OK	-		2022-03-24 16:27:10
2.n.1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	- Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C - Terlaksananya pelayanan uji berkala - Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi - Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0.733		Ada	2022-02-23 10:07:13	OK	-		2022-03-24 16:27:26
2.n.2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	- Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C - Terlaksananya pelayanan uji berkala - Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi - Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0.35		Ada	2022-02-23 10:36:58	OK	-		2022-03-24 16:27:45
2.o.1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	- Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo - Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo - Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 51. Jumlah PD = 103	49.514563		Ada	2022-03-25 08:11:56	OK	-		2022-03-25 08:21:17

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 289. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 2847	10.151036	Ada	2022-03-25 09:17:48	OK	-	2022-03-25 09:19:38
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota 	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = -213496. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 294863	-72.40515	Ada	2022-03-09 09:45:22	OK	-	2022-03-25 09:20:17
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Tingkat hunian akomodasi 	Jumlah kamar yang terjual = 189.592. Jumlah kamar yang tersedia = 3402	5.5729571	Ada	2022-03-09 09:50:59	OK	-	2022-03-25 09:21:39

[illegible]

[illegible]

[illegible]